

MENYIAPKAN RIMBAWAN PEMIMPIN Perubahan Masa Depan

ARTIKEL LAINNYA

FORUM KOORDINASI DAN KOMUNIKASI Pengelolaan Cagar Biosfer Lore Lindu siapkan peninjauan berkala cagar biosfer

LOKAKARYA IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PELATIHAN bagi Staf Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Tanah Papua

PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM Universitas Ottow Geissler Papua Bidang Sistem Informasi Geografis dan Pemetaan

Editorial

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengamatkan bahwa pengelolaan hutan lestari dilaksanakan sampai tingkat Unit Pengelola di tingkat tapak melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sesuai fungsi pokok dan peruntukannya. Para pemangku kepentingan memandang pengelolaan di tingkat tapak ini sebagai sebuah sistem yang dapat lebih menjamin terwujudnya kelestarian fungsi dan manfaat hutan, baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial.

Terkait dengan pembangunan KPH di Provinsi Papua, saat ini terdapat 14 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan 19 Cabang Dinas Kehutanan (CDK) yang aktif. Cabang Dinas Kehutanan (CDK) ini memiliki peran administratif perizinan di sektor kehutanan, dan merupakan salah satu inovasi kelembagaan di tingkat daerah yang tidak ditemukan di provinsi lain. Sedangkan di Provinsi Papua Barat, saat ini sedang terjadi restrukturisasi organisasi KPH menjadi 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan 10 Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Restrukturisasi ini dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Menteri LHK Nomor SK 113/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2022 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Papua Barat.

Dinamika kebijakan pembangunan KPH di tingkat nasional sendiri berubah sangat cepat. Dua tahun silam, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. UU ini beserta peraturan turunannya (misal PP No. 23 tahun 2021) membawa

perubahan signifikan karena KPH yang sebelumnya diberi kewenangan sebagai pengelola hutan tingkat tapak dan boleh mengembangkan bisnis usaha, dalam regulasi baru ini dibatasi perannya sebagai “fasilitator” implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, fasilitasi Program Perhutanan Sosial dan fasilitasi pengembangan investasi dan pengelolaan hutan. Perubahan kebijakan ini menimbulkan reaksi beragam dari sebagian KPH di daerah yang sedang bergairah mengembangkan usaha sesuai slogan “satu KPH satu Produk”.

Di tingkat sub nasional (provinsi) sendiri, terdapat perubahan administrasi pemerintahan dengan adanya pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Sedangkan di Papua Barat terjadi pemekaran menjadi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Perubahan administrasi pemerintahan ini akan berdampak kepada KPH karena konstelasi kelembagaan Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH didalamnya akan berubah. Di sisi lain, dengan kondisi sistem tenurial yang berbasis masyarakat adat menuntut KPH harus mampu menyikapinya secara luwes.

Dalam situasi seperti ini kehadiran pimpinan KPH yang visioner sangat diperlukan untuk memberi arah bagi anggota organisasinya. Selain itu pimpinan KPH juga diharapkan mampu membangun kerja sama tim, mengelola konflik dalam tim dan membangun sinergi dengan pihak eksternal guna mencapai target kinerja organisasi KPH di tengah-tengah perubahan sosial yang sangat dinamis.

Edy Marbyanto
Manajer bidang strategis Pengembangan Kapasitas SDM



Menyiapkan Rimbawan Pemimpin Perubahan Masa Depan

Catatan penyelenggaraan pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan
(*Leadership and Change Management*)

Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan Kapasitas SDM



2

Mengapa FORCLIME mendukung kegiatan ini?

Ketika pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mulai digalakkan tahun 2009, upaya penyiapan sumber daya manusia untuk KPH mulai dikembangkan. Pusat Diklat Kehutanan (yang kemudian berubah nama menjadi Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan) kemudian mengembangkan berbagai paket pelatihan untuk Calon Kepala KPH, Fungsional Perencana di KPH, pelatihan wirausaha dan lain-lain. Dukungan pengembangan SDM untuk KPH tersebut selaras dengan menguatnya dukungan kebijakan untuk pembangunan KPH. Sampai ada istilah “no KPH, no budget”, yang menunjukkan betapa kuatnya dukungan politik anggaran untuk mendukung pembangunan KPH tersebut.

Salah satu paket pelatihan yang dikembangkan oleh Pusat Diklat Kehutanan adalah Pelatihan untuk Calon Kepala KPH yang diselenggarakan selama sekitar 90 hari efektif (*on and off campus*). Materi yang dibahas dalam pelatihan ini mencakup materi Teknis Pengelolaan Hutan, Kelembagaan KPH, Kewirausahaan, Kepemimpinan, Manajemen Konflik dan lain-lain. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi para Calon Kepala KPH karena mereka memperoleh bekal yang sangat berharga tentang konsep kelembagaan KPH sebagai infrastruktur kelembagaan untuk mendukung tercapainya pengelolaan hutan lestari. Pelatihan yang diselenggarakan secara nasional ini juga sangat bermanfaat untuk membangun pertukaran pengalaman dan pengetahuan diantara sesama peserta yang latar belakang situasi lapangnya sangat beragam.

Namun dukungan politik termasuk anggaran terhadap pembangunan KPH mulai menurun sejak tahun 2016. Kegiatan pelatihan untuk KPH semakin merosot frekuensinya. Akibatnya banyak Kepala KPH yang baru tidak memperoleh pelatihan pembekalan, demikian pula dengan staf KPH. Padahal di sisi lain personel KPH, khususnya pimpinan KPH dituntut untuk selalu *well-updated* dengan perkembangan kebijakan pembangunan KPH dan dinamika sosial di lapangan.

Untuk mengatasi kesenjangan kompetensi kepemimpinan bagi para Kepala KPH, sejak 2018 FORCLIME bekerja sama dengan Lembaga konsultan MDF Pacific Indonesia telah menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan bagi para pejabat struktural di KPH. MDF Pacific Indonesia (MDF PI), merupakan lembaga internasional yang bergerak dalam penyediaan jasa konsultasi pelatihan manajemen. MDF PI ini mempunyai reputasi internasional dan memegang ISO 9001 sejak 2015. Di Indonesia, MDF PI juga bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan lembaga tinggi negara, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretaris Negara, Lemhanas dll.

Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan bagi para pejabat struktural di KPH ini pernah diselenggarakan di Samarinda – Kalimantan Timur (tahun 2018), Palu – Sulawesi Tengah (2020), Tanjung Selor– Kalimantan Utara (2020), Pontianak - Kalimantan Barat (2020). Materi pelatihan yang disajikan dalam pelatihan ini mencakup cara memimpin organisasi dan cara mendorong serta mengelola proses perubahan dalam sebuah organisasi.

Pada saat implementasi FORCLIME 4.0 di Provinsi Papua dan Papua Barat, peningkatan kapasitas bagi SDM KPH di Tanah Papua dirasakan sangat diperlukan. Akses informasi dan komunikasi yang terbatas, membuat kesempatan pengembangan kompetensi bagi SDM KPH juga terbatas. Hal ini diperparah dengan geografis yang tersebar dan mahal biaya transportasinya, membuat upaya pengembangan kapasitas SDM sulit untuk dilaksanakan secara intensif dan reguler.

Untuk mengatasi kesenjangan kompetensi bagi SDM KPH di Tanah Papua, FORCLIME kemudian mengembangkan beberapa paket pelatihan seperti Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan, Kewirausahaan dan Pemasaran secara Digital. Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan bagi pejabat struktural KPH dan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) di Tanah Papua, menjadi salah satu prioritas pelatihan karena para pejabat tersebutlah yang akan menjadi motor organisasi KPH di masa depan. Melalui pelatihan ini diharapkan para pejabat struktural KPH dan CDK akan memperoleh tambahan kompetensi manajerial dan kepemimpinan sehingga nantinya dapat menjalankan tugas dengan baik.

Tujuan pelatihan

Tujuan dari pelatihan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan ini adalah untuk membekali mitra kerja FORCLIME [pejabat struktural Dinas Kehutanan, KPH dan CDK serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UPT KLHK) di Tanah Papua dengan kompetensi di bidang kepemimpinan serta dalam mengelola proses perubahan di organisasinya masing-masing.



Lebih khusus lagi, pelatihan dirancang guna membantu peserta untuk:

- Memahami perkembangan pendekatan kepemimpinan dan keterkaitannya dengan budaya organisasi;
- Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan kompetensi yang perlu dimiliki pemimpin dan manajer;
- Menemukenali jati diri serta gaya kepemimpinan mereka sendiri;
- Siap menghadapi tantangan dalam memimpin dan mengelola tim serta individu dalam organisasi;
- Dapat meningkatkan keterampilan dalam komunikasi dan pengambilan keputusan;
- Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam organisasi dan bagaimana memimpin dan mengelola proses perubahan untuk memastikan hasil yang maksimal;
- Memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang berbagai dimensi perubahan, termasuk komunikasi dalam proses perubahan dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi perubahan proses atau bahkan hasil;
- Memahami pentingnya sisi kemanusiaan dari perubahan;
- Berlatih mengembangkan rencana perubahan menggunakan kasus mereka sendiri.

Program Pelatihan Kepemimpinan & Mengelola Perubahan



Materi Pelatihan

Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan ini diselenggarakan dalam lima hari efektif. Dengan mengacu pada Tujuan Pelatihan di atas, materi yang disajikan dalam pelatihan ini meliputi:

1. Kepemimpinan organisasi dan kompetensi pemimpin/manajer.
2. Mengenal diri dan interaksi di tempat kerja.
3. Mengelola tim dan pengambilan keputusan.
4. Menghadapi tantangan baru dan siklus perubahan.
5. Mengelola perubahan.

Siapa peserta pelatihan?

Kegiatan pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan di Tanah Papua dilaksanakan atas kerja sama FORCLIME dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua di Provinsi Papua dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Rincian pelaksanaan pelatihan tersebut adalah sebagai berikut:

PROVINSI	ANGKATAN	TANGGAL	LOKASI	JUMLAH PESERTA
Papua	Pertama	29 Agustus – 2 September 2022	Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> KPH & CDK & Dishut: 20 org UPT KLHK: - FORCLIME: 2 org
	Kedua	5-9 September 2022	Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> KPH & CDK & Dishut: 17 org UPT KLHK: 3 org FORCLIME: 1 org
Papua Barat	Pertama	12-16 September 2022	Sorong	<ul style="list-style-type: none"> KPH & CDK & Dishut: 19 org UPT KLHK: 1 org FORCLIME: 1 org
	Kedua	19-23 September 2022	Sorong	<ul style="list-style-type: none"> KPH & CDK & Dishut: 16 org UPT KLHK: 3 org FORCLIME: 1 org

Dengan demikian, sebanyak 72 rimbawan pejabat struktural dari lingkup Dinas Kehutanan (termasuk KPH dan CDK) di Tanah Papua, 7 orang rimbawan lingkup UPT KLHK di Tanah Papua dan 5 orang staf FORCLIME telah mendapatkan layanan peningkatan kompetensi terkait kepemimpinan dan cara mengelola perubahan.

Peserta yang mengikuti pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan tersebut diseleksi oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Pejabat struktural (eselon 3 dan 4) pada lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Papua, utamanya KPH atau pejabat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Mempunyai motivasi tinggi untuk menghadiri pelatihan secara penuh.
- Mempunyai motivasi tinggi untuk menindaklanjuti hasil/rekomendasi pelatihan di institusi masing-masing.
- Dalam kondisi sehat, *non-reactive* COVID-19

Metoda pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode pembelajaran interaktif dan pendekatan *experiential learning* yang merupakan metode pembelajaran yang tepat untuk orang dewasa. Topik dan konsep/atau teori dimulai dengan permainan yang terkait dengan topik, menonton video pendek dan atau berbagi pengalaman. Kemudian dilanjutkan dengan analisis serta diskusi pleno untuk menyimpulkan bersama.

Adanya permainan (*game*), video, diskusi dan berbagai metode lain membuat suasana kelas menjadi interaktif dan dinamis. Pelatih dalam pelatihan ini juga menggunakan permainan anak-anak seperti membuat menara dari balon untuk menyampaikan materi tentang kerja sama tim. Kelihatannya seperti kekanak-kanakan tetapi banyak peserta yang menyukai metode seperti ini karena sangat efektif untuk membangun suasana kelas yang dinamis dan menyegarkan. Metode ini juga akan menjamin peserta untuk lebih memahami dan mengingat topik yang dibahas, karena materi pembelajaran diungkap dari pengalaman riil mereka sendiri.



Proyek Perubahan Oleh Peserta

Selama pelatihan, para peserta mengerjakan kasus-kasus untuk mempraktikkan teori, konsep, dan prinsip dalam mengelola perubahan. Pada saat dua hari terakhir pelatihan, peserta dibagi dalam 3-4 kelompok diskusi berdasarkan daerah asal mereka. Setiap kelompok diminta untuk memilih satu kasus guna didiskusikan dan dikembangkan sebagai kasus “proyek perubahan” yang relevan bagi mereka. Dalam sesi ini masing-masing kelompok merancang proses perubahan yang mencakup:

- Pembentukan tim perubahan dan penyepakatan pembagian tugas.
- Analisis kekuatan dan kelemahan terhadap proyek perubahan yang diusulkan (*force field analysis*).
- Analisis *stakeholder* atau analisis bagan kepentingan.
- Analisis sumber daya.
- Strategi komunikasi dengan para pihak.

Daftar Proyek Perubahan yang diusulkan oleh masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:

PROVINSI	ANGKATAN PELATIHAN	PROYEK PERUBAHAN
Papua	Pertama	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Perubahan kebiasaan menebang kayu jadi petani budidaya lebah madu. Pengembangan Taman Burung dan Taman Anggrek (TBTA) Biak. Pencegahan perambahan kayu soang di Cagar Alam Cycloop-Pengembangan pembuatan briket arang.
	Kedua	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan wisata Onggaya SPTN Wilayah II Ndalir Taman Nasional Wasur. Peningkatan produksi Teh Murbei dengan peralatan mesin. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di wilayah Lapago melalui pengolahan buah merah.
Papua Barat	Pertama	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Informasi Dinas Kehutanan (SIDAK). Pengolahan paska panen biji pala secara modern. Pembangunan hutan hak. Sistem eKinerja ASN.
	Kedua	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan eKinerja ASN. Peningkatan pemasaran produk pala. Pelaporan <i>online</i> pengawasan dan perlindungan hutan dengan sistem "Pulbaket". Gema Duta Mangrove.

FORCLIME akan menganalisis usulan proyek perubahan dari seri pelatihan ini secara lebih mendalam, khususnya yang diusulkan oleh KPH dampingan FORCLIME, untuk melihat kemungkinan kegiatan tindaklanjutnya.

Apa kata mereka tentang pelatihan

Hampir semua peserta mengatakan pelatihan ini memperdalam dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam kepemimpinan dan mengelola perubahan. Selain itu, banyak juga yang mengatakan bahwa beberapa konsep baru bagi mereka, terutama dalam mengelola perubahan. Aspek/topik dari kepemimpinan serta proses perubahan yang menjadi topik favorit para peserta adalah: (1) Pengembangan konsep kepemimpinan; (2) Mengelola konflik di tempat kerja; (3) Berbagai teknik dalam pengambilan keputusan; (4) Berbagai peran dalam proses perubahan; dan (5) Mengembangkan proses perubahan.

Peserta juga menyukai permainan asah atau permainan yang digunakan pelatih untuk memperkenalkan topik, karena menurut mereka *teaser* dan *game* memudahkan mereka untuk memahami konsep atau topik yang diperkenalkan.

Pada saat akhir pelatihan, peserta melakukan evaluasi terhadap tingkat kepadatan jadwal/waktu pelatihan, isi pelatihan (keseimbangan teori dan praktek), pemenuhan harapan, kualitas pelatih dan fasilitas pelatihan. Secara keseluruhan, pelatihan ini dinilai positif.

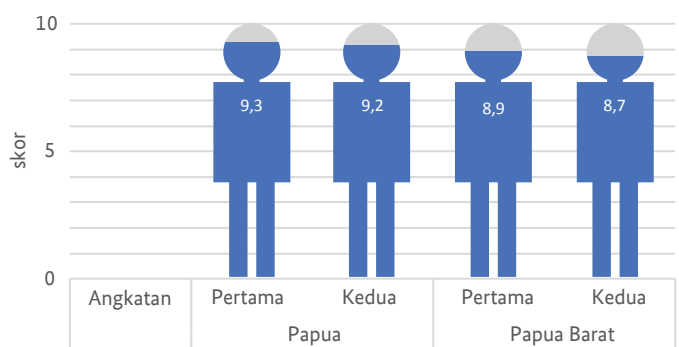
“Saya sangat senang sekali dengan pelatihan ini. Belum ada pelatihan seperti yang kita ikuti dan ini sangat bermanfaat sekali untuk kami para pemimpin dan calon pemimpin yang akan datang. Pembelajaran yang diperoleh dari pelatihan ini dapat diterapkan, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam membina kelompok tani hutan untuk meningkatkan produk-produk yang sudah ada pada wilayah dan unit kerja”,

kata Debora Ludia Sawen, S.Hut., M.Si., Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sekaligus sebagai pelaksana harian Kepala KPHP Unit XXI Lintas Sarmi Mamberamo, Provinsi Papua.

Donny Natalion Bosawer S.Hut., M.Sc., Kepala Cabang Dinas Kehutanan Sorong Selatan, Papua Barat yang pada saat penutupan acara pelatihan menyampaikan kesan bahwa;

“Pelatihan ini sangat menarik dan menyenangkan. Dari pelatihan ini saya menarik kesimpulan bahwa untuk bisa mendorong dan memimpin perubahan, saya perlu merubah diri saya sendiri. Perubahan harus dimulai dari diri saya sendiri. Saya tidak akan bisa memimpin perubahan bila saya sendiri tidak bisa memberi contoh kepada anak buah saya atau ke orang lain”.

Hasil evaluasi pelatihan



Epilog

Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan untuk para pejabat struktural Dinas Kehutanan/KPH/CDK serta UPT KLHK ini diselenggarakan secara *cost sharing* antara FORCLIME dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Banyak biaya dan sumber daya yang harus dikeluarkan untuk mendukung terselenggaranya pelatihan ini, karena banyak peserta yang berasal dari daerah terisolir dan membutuhkan biaya transportasi yang mahal. FORCLIME berharap investasi pengembangan SDM ini dapat mendukung lahirnya rimbawan-rimbawan pemimpin yang kompeten dan berintegritas serta mampu menjadi ujung tombak pengelolaan hutan lestari di Tanah Papua.

Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Lore Lindu siapkan peninjauan berkala cagar biosfer

Dalam rangka memastikan cagar biosfer dapat berfungsi sesuai penetapannya, Man and the Biosphere-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (MAB-UNESCO) melakukan peninjauan berkala terhadap keberadaan cagar biosfer secara berkala setiap 10 tahun sekali. Peninjauan berkala ini akan dilaksanakan di Cagar Biosfer Lore Lindu (CBLL) pada tahun 2023 atau 2024 mendatang.

Untuk mempersiapkan peninjauan berkala CBLL, diperlukan data dan informasi yang komprehensif terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan di setiap zona (inti, penyangga, dan transisi). FORCLIME mendukung Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan CBLL dalam melaksanakan kegiatan asistensi pengumpulan data dan sinkronisasi program kegiatan terintegrasi di CBLL pada periode 2021-2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 26 September 2022 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan dibuka oleh Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, MT selaku Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah yang sekaligus



menjabat sebagai Ketua Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan CBLL.

Kegiatan asistensi ini mengundang Organisasi Perangkat Daerah yang berkegiatan di CBLL untuk bertukar data dan informasi terkait program yang dilaksanakan di masing-masing zona. Selain itu, diskusi juga dilakukan untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi dalam berkegiatan di kawasan CBLL. Melalui kegiatan asistensi ini, diharapkan terkumpul rangkaian kegiatan pembangunan berkelanjutan dari berbagai pihak yang memberi gambaran tentang keadaan CBLL sekarang, sekaligus sebagai masukan untuk penyusunan rencana aksi Cagar Biosfer Lore Lindu ke depannya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Fikty Aprilinayati**, Advisor bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Pengelolaan Cagar Biosfer
2. **Ismet Khaeruddin**, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Lokakarya Identifikasi Kebutuhan Pelatihan bagi Staf Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Tanah Papua

Sejak penerapan “Omnibus Law” atau UUCK Cipta Kerja, peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bergeser dari orientasi bisnis menjadi pemantau i operasi hutan dan fasilitator investasi kehutanan, termasuk sebagai penyedia layanan publik bagi masyarakat lokal. Oleh karenanya, KPH harus dikelola oleh SDM yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas. Memadai secara kuantitas berarti jumlah SDM di KPH sebanding dengan beban kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan memadai secara kualitas berarti sumber daya manusia pengelola KPH memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan standar dan tujuan pengelolaan KPH.

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas personel KPH di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat bersama FORCLIME melakukan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) atau Training Needs Assessment (TNA) melalui focus group discussion (FGD). Tujuan pelaksanaan FGD ini adalah pertama, untuk mensosialisasikan kegiatan peninjauan kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan bagi institusi KPH di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; Kedua, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas level individu dan organisasi bagi KPH dan CDK yang ada di Tanah



Papua. Pada FGD ini para peserta juga melakukan uji coba pengisian formulir kuisioner IKD secara *online*.

FGD Identifikasi kebutuhan pelatihan di Provinsi Papua dilaksanakan pada tanggal 3 September 2022 di Jayapura dan dihadiri oleh 20 peserta yang mewakili KPH dan CDK di Provinsi Papua Sedangkan di Provinsi Papua Barat dilaksanakan pada tanggal 17 September 2022 di Sorong, Papua Barat, dibuka oleh Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan dihadiri oleh 18 orang peserta yang mewakili KPH dan CDK di Provinsi Papua Barat.

Pelaksanaan lokakarya dibantu oleh Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), sebuah lembaga konsultan yang telah berpengalaman dalam pengembangan SDM untuk mendukung pembangunan kehutanan khususnya Program Perhutanan Sosial termasuk dalam pengembangan SDM-nya. Hasil dari pelaksanaan lokakarya ini adalah daftar kebutuhan pengembangan kompetensi

yang dapat digunakan sebagai acuan untuk proses perencanaan pendidikan dan pelatihan bagi para pihak terkait, khususnya, Pusat Diklat SDM LHK, Balai Diklat LHK, Dinas Kehutanan/KPH, lembaga donor dan lain-lain.

Tindak lanjut dari lokakarya ini adalah konsultan akan melakukan kunjungan ke beberapa KPH untuk melakukan indepth interview dengan pejabat dan staf KPH di beberapa KPH terpilih, penggalan data secara daring kepada pejabat dan staf KPH di KPH-KPH di Tanah Papua yang tidak bisa dikunjungi, dan penyusunan laporan. Selanjutnya, akan dilakukan lokakarya untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan draft laporan yang telah tersusun.

“Kami sangat berharap hasil identifikasi kebutuhan Diklat ini dikomunikasikan ke KLHK dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat agar ada kejelasan Tupoksi dan peran KPH dalam pembangunan kehutanan di Papua Barat, serta dapat dirancang pengembangan SDM yang sesuai kebutuhan di lapangan”, kata Donny N. Bosawer, S.Hut., M.Sc. dari CDK Sorong Selatan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Edy Marbyanto**, Manajer Bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM

Pengembangan Kapasitas SDM Universitas Ottow Geissler Papua Bidang Sistem Informasi Geografis dan Pemetaan

Sebagai bagian dari pengembangan kapasitas sumber daya manusia, Universitas Ottow Geissler Papua, didukung FORCLIME, mengadakan pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Pemetaan. Kegiatan ini merupakan pelatihan SIG tingkat dasar dengan menggunakan aplikasi berbasis bebas dan sumber terbuka – QGIS. Pelatihan yang dibuka oleh Dekan Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan, Universitas Ottow Geissler Papua, Ir. Simon H. Nenepath, M.Si., diselenggarakan pada tanggal 17 hingga 20 Oktober 2022 di Kampus Universitas Ottow Geissler Papua (UOGP) di Jayapura, Provinsi Papua. Narasumber pelatihan ini adalah advisor FORCLIME, yaitu Advisor Remote Sensing/GIS dan e-Learning, Danan P. Hadi, dan Advisor Junior bidang GIS dan Pemetaan, Ruben Yogi.

Secara umum, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dosen dan mahasiswa di bidang SIG dan Pemetaan untuk mendukung pengembangan Pusat Keunggulan untuk Sistem Informasi Geografis dan Pemetaan (Center of Excellence GIS & Mapping) di Universitas Ottow Geissler Papua (UOGP).

Sejak 2021 Universitas Ottow Geissler Papua dan FORCLIME telah bersinergi dalam mendorong pendirian dan pengembangan Pusat Keunggulan untuk SIG dan Pemetaan sebagai pusat layanan SIG dan pemetaan berbasis perguruan tinggi di Provinsi Papua yang berpusat di Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan UOGP. Pusat Keunggulan ini diharapkan dapat memberi layanan geospasial kepada akademisi, pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta terkait dengan perencanaan tata ruang, pengelolaan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati.

“Sebagai pengajar Ekonomi Regional, materi pelatihan ini dapat diaplikasikan untuk memetakan persoalan-persoalan terkait



dengan ekonomi regional”, kata Amsal Ilindamon, S.Sos, M.Si., Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ottow Geissler Papua. Berharap FORCLIME dapat memberikan pelatihan berikutnya yang lebih mendalam untuk pengembangan SDM di lingkungan kampus UOG Papua, tambah nya.

Pelatihan ini akan ditindaklanjuti dengan sesi Pelatihan Sistem Informasi Geografis tingkat lanjut .

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Danan P. Hadi**, Advisor bidang Remote Sensing/GIS dan eLearning
2. **Ruben Yogi**, Advisor Junior bidang GIS dan Pemetaan
3. **Edy Marbyanto**, Manajer Bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM

FORCLIME Forests and Climate Change Programme
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Mangala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
Fax: +62 (0)21 572 0193
www.forclime.org

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Surel korespondensi: ratu.widyawati@giz.de



Bekerja sama dengan:

